



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SANDY FIRDAUS
2. Jabatan : DIREKTUR DANA TRANSFER UMUM
3. NHK : 139753

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 905.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/45 m2 di KAB / KOTA BOGOR,
HASIL SENDIRI Rp. 905.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 395.500.000

1. MOBIL, CHEVROLET ZAFIRA MINIBUS Tahun 2003, HASIL
SENDIRI Rp. 35.000.000
2. MOTOR, HONDA CS1 SEPEDA MOTOR Tahun 2008, HASIL
SENDIRI Rp. 3.500.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.
4.500.000
4. MOTOR, YAMAHA XSR Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
32.500.000
5. MOBIL, HYUNDAI SANTAFE Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
320.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 174.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 450.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.925.000.000

III. HUTANG Rp. 422.250.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.502.750.000

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.